

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menjelaskan dinamika Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik internasional dengan studi kasus tindakan veto yang dilakukan oleh Rusia. Penelitian ini dianalisa menggunakan pandangan Neorealisme, bahwa pemikiran ini lebih menekankan pada hubungan kausal antara struktur dan unit (negara), yang menyatakan bahwa struktur mempengaruhi perilaku unit. Neorealisme memiliki tiga aspek penting yang dapat menjelaskan sebuah struktur politik. Waltz memberikan tiga aspek yaitu *ordering principle*, *distribution of capabilities and differentiation of function*. Neorealisme juga menerapkan tiga aspek tersebut dalam politik internasional. Neorealisme memiliki penekanan bahwa sistem internasional itu bersifat anarki. Bahwa tidak ada kekuatan supra-nasional diatas negara dan organisasi internasional dijadikan sebagai alat politik luar negeri dari sebuah negara. Sehingga tidak ada organisasi atau kekuatan diatas negara yang dapat membatasi sebuah negara dalam membuat sebuah kebijakan. Adapun dalam perumusan suatu kebijakan, suatu negara akan dihadapkan kepada beberapa pilihan. Negara akan memilih suatu tindakan yang nantinya akan memaksimalkan tujuan dan target yang ingin diharapkan, terkhusus kepentingan nasionalnya. Keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip utama dan tujuan strategis dalam menyusun sebuah kebijakan. Dalam hal ini merupakan kebijakan luar negeri.

Pada tahun 1945 dan perang dunia II menyelimuti sebagian besar dunia dalam 30 tahun terakhir pada akhirnya telah berhenti. Di lingkungan tersebut, perwakilan dari China, Inggris Raya, Uni Soviet, dan Amerika Serikat bertemu di Dumbarton Oaks di Washington D.C. Diskusi ini dilakukan sebagai awal yang akan mengarah pada penciptaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi itu

dibuat sebagai respon dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Salah satu keagalannya adalah tidak ada pembagian tugas yang jelas antara Majelis Liga dan Komite Dewan. Perwakilan tersebut mengakui konsensus bahwa Organisasi internasional yang akan diusulkan harus mengandung organ prinsip yang ditugaskan secara khusus dengan mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional. Setelah pertimbangan hati-hati di Konferensi San Francisco pada tahun 1945, sampai pada kesimpulan bahwa akan ada sebuah badan yang lebih kecil bertindak sebagai penasihat pertahanan dan eksekutor dalam operasi, yang secara khusus ditugaskan untuk "pemeliharaan" perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian lahirlah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada Bab V mengacu pada organisasi dan fungsi Dewan Keamanan. Dewan ini terdiri dari 15 negara anggota; lima kursi di Dewan bersifat permanen, dan tersisa sepuluh kursi yang berputar setiap periodenya. Lima anggota permanen sering disebut sebagai Anggota "P-5". Lima anggota tetap mempertahankan hak veto atas resolusi yang dibahas di Dewan Keamanan. Anggota tetap ini diberikan hak veto terutama untuk memastikan bahwa tidak ada anggota P-5 yang akan menyerang anggota P-5 yang lainnya. Salah satu alasan utama penciptaan, ukuran dan kekuatan adalah untuk memungkinkan Dewan Keamanan dengan cepat menanggapi krisis internasional jika suatu saat dapat terjadi. Sebuah tugas yang unik dari Dewan Keamanan adalah bertugas mengubah bencana menjadi pembangunan yang konstruktif dan sebagai alternatif, Dewan Keamanan harus merancang strategi yang ada khususnya ditujukan pada konflik tertentu. Sebelum Dewan Keamanan bisa menghadapi krisis, Dewan harus memiliki konsep yang jelas tentang masalah mendasar yang menyebabkan konflik dan siapa yang terpengaruh oleh konflik tersebut. Dewan Keamanan terutama beroperasi di bawah mandat BAB VI Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Bab VI yang berjudul "*Pacific Settlement of Disputes*" dan mengamanatkan tindakan yang mungkin dilakukan termasuk pembicaraan damai, pertemuan tertinggi, mediasi dan negosiasi. Pada tahun 1992, Sekretaris Jenderal PBB Boutros Ghali memiliki 4 tindakan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, yakni: 1. *Preventive Diplomacy*, 2. *Peace Making*, 3. *Peace Keeping*, 4. *Peace Building*.

Kemajuan Dewan Keamanan agak bervariasi. Selama akhir 1940an, Dewan Keamanan cukup efektif dalam menangani banyak isu yang muncul. Sebagian besar urusan yang ditemui dan harus ditangani biasanya berpusat pada dekolonisasi. Namun, seiring berjalannya waktu hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat memburuk, dan Dewan menghadapi kemunduran dalam menjalankan tugasnya. Hal itu ditanda dengan seringnya penggunaan hak veto oleh Uni Soviet yang memblokir banyak usaha. Anggota P-5 lainnya juga menggunakan veto untuk memperlancar kepentingan masing-masing negara. Dalam perundingan yang membangun pembentukan PBB, hak veto dibenci oleh banyak negara kecil karena apabila sebuah resolusi ditolak oleh anggota P-5, maka resolusi tersebut tidak bisa diadopsi. Meskipun hak veto tidak secara eksplisit disebutkan dalam Piagam PBB, namun fakta bahwa keputusan "substansif" oleh Dewan Keamanan PBB mewajibkan "suara yang sesuai dari anggota tetap". Berarti bahwa setiap anggota tetap tersebut dapat mencegah adopsi tersebut. Untuk alasan ini, kekuatan hak veto juga disebut sebagai prinsip kebulatan kekuatan yang besar.

Sebagai negara yang dulunya masuk dalam kedaulatan Uni Soviet, Ukraina sekarang menjadi negara yang telah merdeka dan berdaulat. Sayangnya hubungan dengan negara bekas induknya, Rusia, tidak baik berbeda dengan hubungan Rusia dengan negara-negara pecahan lainnya seperti Kazakhstan atau Kyrgyzstan dan

Uzbekistan. Krisis diplomatik Rusia-Ukraina juga dipicu oleh penyewaan pangkalan Armada Laut Hitam oleh Rusia di Sevastopol di Semenanjung Crimea yang dihuni mayoritas etnik Rusia. Rusia diperkirakan membayar Ukraina US\$ 98 juta per tahun untuk penyewaan pangkalan angkatan laut di Krimea. Hubungan kian memburuk ketika Ukraina berniat menjadi anggota negara-negara Pakta Pertahanan NATO yang didominasi Amerika dan Eropa Barat. Belum lagi soal perselisihan mengenai ongkos pengiriman gas Rusia ke Eropa yang harus melalui pipa saluran gas Ukraina. Presiden baru Ukraina, Viktor Yanukovych, telah menjanjikan perbaikan dramatis dalam hubungan dengan Rusia selama kunjungan resminya yang pertama ke Moskow. Menyambut Yanukovych, Medvedev mengatakan kemenangan pemilihan Yanukovych berarti bahwa "hubungan persaudaraan" antara Ukraina dan Rusia sekarang dapat dipulihkan. Dia memberikan jaminan bahwa Ukraina tidak terpikirkan untuk bergabung dengan NATO, meskipun tidak menutup kesempatan untuk adanya kerjasama.

Vladimir Putin tidak terima ketika Rusia dicap hanya sebagai negara yang mewarisi kekuatan dari Uni Soviet. Oleh sebab itu Putin berencana untuk mengembalikan kehormatan Rusia sebagai negara yang adidaya dan menjadi kiblat bagi para negara di dunia dalam aktivitas politik internasional. Terdapat tiga interpretasi yang masuk akal atas langkah Putin untuk menyikapi kasus ini, yakni : *Putin as Defender*, *Putin as Imperialist*, dan *Putin as Improviser*. Putin merebut semenanjung tersebut untuk mencegah dua kemungkinan berbahaya bahwa pemerintah baru Ukraina dapat bergabung dengan NATO dan Kiev dapat mengusir Armada Laut Hitam Rusia dari basis lama di Sevastopol. adanya aneksasi Semenanjung Krimea sebagai bagian dari proyek Rusia untuk secara bertahap merebut kembali bekas wilayah yang dulunya sempat menjadi bagian dari Uni Soviet. Putin tidak pernah

menerima hilangnya prestise Rusia yang mengikuti berakhirnya Perang Dingin. Argumen ini menunjukkan bahwa ia bertekad untuk memulihkannya, sebagian caranya adalah dengan memperluas perbatasan dari Rusia. Untuk memahami alasan di balik pilihan mengapa Rusia menganekasi Krimea, cukuplah untuk mengetahui sejarah Krimea dan apa arti Rusia dan Krimea selama ini. Presiden Vladimir Putin sangat bersemangat untuk melakukan penyatuan kembali Krimea dengan Rusia.

Krimea adalah perpaduan unik antara budaya dan tradisi masyarakat yang berbeda. Rusia dan Ukraina, Tatar Krimea dan orang-orang dari kelompok etnis lain telah tinggal berdampingan di Krimea, mereka mempertahankan identitas, tradisi, bahasa dan kepercayaan mereka sendiri. Jumlah penduduk Semenanjung Krimea saat ini adalah 2,2 juta orang, di antaranya hampir 1,5 juta orang Rusia, 350.000 adalah orang Ukraina yang secara dominan menganggap bahasa asli mereka dari bahasa Rusia. Hanya ada satu hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu jutaan orang dari berbagai etnis menderita selama masa represi dan mengembalikan mereka dalam hak-hak mereka dan membersihkan nama baik mereka. Pemerintah Rusia sangat menghormati orang-orang dari semua kelompok etnis yang tinggal di Krimea. Tentu Rusia tidak bisa meninggalkan permohonan yang tidak dijalankan. Rusia harus membantu menciptakan kondisi sehingga penduduk Krimea untuk pertama kalinya dalam sejarah dapat dengan damai mengekspresikan kebebasan mereka berkenaan dengan masa depan mereka sendiri. Rusia juga harus membuat keputusan yang sulit dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan domestik dan eksternal. Lebih dari 83 persen berpikir bahwa Rusia harus melakukan ini bahkan jika hal itu akan mempersulit hubungan dengan beberapa negara lain. Dalam aspek ekonomi fokus pembahasan dari sektor ekonomi lebih ke konflik "*Gaz War*" yang akan melibatkan kedua negara bahkan memiliki dampak ke berbagai pihak.

Rusia mulai mematikan keran pasokan gas, setelah mengeluh bahwa Ukraina telah gagal melunasi hutangnya pada perusahaan Gazprom yang berdomisi di Rusia. Jalur pasokan Rusia melewati Ukraina ke beberapa negara Uni Eropa dan sebanyak 70% gasnya ke Uni Eropa dilakukan melalui pipa tersebut. Jadi apabila Krimea menjadi wilayah dari Rusia, maka pasokan gas ke Eropa tidak perlu melalui Ukraina, melainkan langsung melewati Rusia.

Dinamika yang terjadi di Dewan Keamanan dalam upaya penyelesaian konflik Krimea ini tidak terlepas dari karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Karakter dan prinsip yang dipegang teguh oleh anggota P-5 Dewan Keamanan sangat berpengaruh terhadap sudut pandang dari negara tersebut dalam menyikapi permasalahan ini. Pada masa awal ketika berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, komisaris Uni Soviet yang kemudian menjadi menteri untuk urusan luar negeri yakni Vyacheslav Molotov melakukan tindakan untuk memveto berbagai resolusi berkali-kali sehingga dia dikenal dengan julukan "Mr. Veto". Sebenarnya, Uni Soviet bertanggung jawab atas hampir separuh dari semua veto yang pernah dikeluarkan sebanyak 79 veto yang digunakan dalam 10 tahun pertama. Rusia ingin mengembalikan kehormatannya seperti ketika masih berbentuk Uni Soviet. Untuk tetap menjaga kekuasaannya dan wajah mereka di sebagai kekuatan dunia maka Rusia melakukan kerjasama dengan China yang notabene merupakan negara di Asia. Oleh sebab itu cita-cita untuk mengembalikan Rusia berjaya lagi seperti masih berbentuk Uni Soviet dituangkan oleh Vladimir Putin kedalam kebijakan untuk menganeksasi wilayah semenanjung Krimea. Kebijakan tersebut diikuti dengan tindakan veto oleh Rusia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai status aneksasi Krimea yang dianggap ilegal. Oleh sebab itu ketika Rusia melakukan veto terhadap konflik Krimea, Pemerintah Rusia masih dapat dengan leluasa untuk menguasai Ukraina dari

berbagai sektor yang dianggap penting demi terciptanya kepentingan nasional.

Jika dilihat ke belakang dari tahun 1948 sampai akhir Perang Dingin, kebijakan luar negeri Amerika Serikat berorientasi pada prinsip yakni penahanan Uni Soviet dan penyebaran komunisme global. Faktor historis tersebut yang mengakibatkan hubungan kedua negara sangat sulit untuk dikatakan baik. Untuk melindungi stabilitas keamanan dunia, Amerika Serikat sangat menentang tindakan aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea. Sesuai dengan prinsip Amerika Serikat sendiri yakni untuk menghentikan penyebaran komunisme global. Meskipun Rusia bukanlah Uni Soviet, namun negara tersebut sudah pasti mewarisi beberapa ajaran nenek moyangnya. Persaingan kedua negara tersebut sudah tidak bisa dikesampingkan berdasarkan fakta sejarah yang telah terjadi. Untuk menindaklanjuti tindakan aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea, Amerika Serikat mengajukan sebuah resolusi ketika Sidang Dewan Keamanan PBB digelar pada tahun 2014. Resolusi tersebut berisikan tentang pemisahan diri Krimea dari Ukraina dinilai tidak memiliki validitas. Hal tersebut menegaskan tentang kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan dan kedaulatan teritorial Ukraina. Resolusi tersebut mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan sepihak dan retorika yang mungkin akan semakin memanas. Amerika Serikat selalu menentang kebijakan suatu negara melalui wadah organisasi internasional. Alternatif sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk Rusia seperti dikeluarkan dari keanggotaan G-8. Hal itu sebagai bentuk penolakan keras terhadap tindakan aneksasi yang dilakukan.

Salah satu prioritas utama untuk Inggris adalah wanita, perdamaian dan keamanan. Pemerintah telah memulai sejumlah resolusi mengenai isu-isu seperti kekerasan seksual dan masuknya perempuan dalam proses

perdamaian. Konflik Krimea yang semakin memanas ditanggapi langsung oleh perwakilan Inggris, Perdana Menteri Cameron berbicara dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande tentang krisis tersebut. Hasil perbincangan di Downing Street mengatakan bahwa mereka telah sepakat untuk berbicara dengan satu suara dan mengirim pesan yang jelas ke Rusia bahwa tindakannya di Ukraina sama sekali tidak dapat diterima. Perdana Menteri Inggris menilai bahwa tindakan tersebut telah melanggar kedaulatan dan integritas teritorial negara lain. Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa situasi yang dialami saat ini adalah situasi paling berbahaya yang dialami oleh Eropa di abad ke 21. Posisi Inggris sangat jelas bahwa tidak dan tidak akan pernah mengakui pengambilalihan ilegal Krimea oleh Rusia. Meskipun tidak banyak tindakan yang diambil oleh Inggris di Dewan Keamanan, namun Pemerintah Inggris memberikan perhatian kepada situasi tersebut diluar keanggotaan PBB atau berdiri sendiri sebagai negara Eropa yang prihatin terhadap tindakan tersebut. Situasi tersebut merupakan situasi paling sulit di regional Eropa di abad ke 21 ini. Sehingga Pemerintah Inggris lebih banyak mengambil kebijakan langsung dari negara terhadap negara.

Perancis yang dianggap sebagai perwakilan Uni Eropa di Dewan Keamanan memberikan respon terhadap konflik tersebut. Dalam hal perdamaian internasional, Perancis sepenuhnya mendukung operasi penjaga perdamaian PBB. Perancis adalah negara kedua yang selalu memberikan kontribusi dalam lima anggota tetap Dewan Keamanan. Untuk menjaga perdamaian dunia tetap stabil, Perancis adalah satu-satunya negara anggota PBB yang menggunakan pasukan nasional untuk mendukung operasi penjaga perdamaian. Di dalam Dewan Keamanan PBB, Presiden Prancis François Hollande bereaksi tidak setuju ketika mengetahui bahwa Moskow menandatangani sebuah



perjanjian yang membuat Krimea menjadi bagian dari Rusia, serta menuntut sebuah respon yang kuat dari Uni Eropa. Presiden Prancis François Hollande mengatakan bahwa dia mengecam Moskow atas sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin secara sepihak yang menjadikan Krimea sebagai bagian dari Rusia. Hollande meminta tanggapan Uni Eropa yang serius dan terkoordinasi terhadap aneksasi Krimea di Rusia yang menurutnya tidak diketahui oleh Perancis. Di era Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis tidak akan menerima aneksasi Rusia di semenanjung Krimea. Setelah bertemu dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko di Paris, Macron mengatakan bahwa Prancis berkomitmen terhadap kedaulatan Ukraina dengan batasan-batas yang diakui. Gérard Araud yang merupakan perwakilan dari Prancis untuk Dewan Keamanan menyindir bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Rusia seolah seperti "memveto Piagam PBB" dengan mengambil tindakan untuk memveto resolusi untuk penyelesaian krisis di Ukraina.

Pada tahun 1989 Deng Xiaoping menetapkan bahwa China harus mengadopsi sikap rendah hati dalam urusan internasional. Seperti yang disampaikan olehnya bahwa China harus mengamati dengan dingin, mengamankan posisi, mengatasi sebuah permasalahan dengan tenang, menyembunyikan posisi dan tantangan menunggu waktu mereka, tetap low profile, tidak pernah memimpin, dan memberi sebuah kontribusi. Seorang akademisi Rusia telah mengamati bahwa ada sebuah konsekuensi atas tindakan mereka. Konsekuensinya adalah ketergantungan terbesar China terhadap interaksi dengan Rusia sebagai eksponen utama kepentingan dunia non-Barat dalam isu global. Jadi Cina umumnya mendukung prakarsa Rusia. Adapun perhatian paling mendasar bagi China di PBB adalah prinsip pertama yaitu menjaga kedaulatan negara yang ada. Prinsip ini membuat China

enggan mendukung solusi diplomasi untuk krisis keamanan internasional yang melibatkan keterlibatan eksternal dalam urusan internal sebuah negara tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat. Apabila ada campur tangan dari pihak eksternal dikhawatirkan justru akan menimbulkan permasalahan yang baru. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Cina dalam beberapa tahun terakhir memilih untuk memveto deklarasi PBB, dan bahkan kadang-kadang sebuah resolusi yang membuat PBB untuk campur tangan dalam urusan internal negara demi menyelesaikan tantangan internasional menuju perdamaian dan keamanan. Pemerintah China lebih selektif dalam menanggapi konflik yang muncul. Perlu ada analisis terlebih dahulu dari dampak yang akan timbul dari permasalahan tersebut. Untuk menanggapi konflik yang terjadi antara Rusia-Ukraina terhadap aneksasi di wilayah Semenanjung Krimea, Pemerintah China secara tradisional merupakan sekutu Rusia di Dewan Keamanan. Sehingga sependapat dengan kebijakan Rusia untuk melakukan aneksasi. Namun ketika tidak berkenaan langsung dengan kepentingan China maka keputusan yang diambil adalah abstain. China selalu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Penjelasan tersebut disampaikan guna menjelaskan abstainnya China dalam pemungutan suara. Itu juga dilakukan untuk memberi pengertian ke Barat bahwa tindakan yang diambil oleh China sangat rasional. Pada saat yang sama kita melihat adanya campur tangan asing juga merupakan alasan penting yang menyebabkan terjadinya bentrokan dengan kekerasan di wilayah Ukraina.

Dunia yang bersifat anarki menyebabkan tidak ada kekuatan supra nasional yang mampu untuk menghentikan sebuah negara dalam memuat keputusan. Organisasi internasional dijadikan sebagai wadah berpolitik dan bahkan dapat dijadikan alat politik luar negeri suatu negara. Oeh sebab tu negara pasti akan menerapkan *self help* system agar tetap dapat survive di politik dunia.

Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki dari masing-masing negara anggota P-5 di Dewan Keamanan, dapat memberikan pemahaman mengapa dinamika yang tidak stabil dapat terjadi dalam penyelesaian konflik Krimea. Prinsip yang dipegang teguh oleh masing-masing negara sangat memberikan pengaruh bagaimana negara harus menyikapi suatu permasalahan.

Selanjutnya, perlu disadari bahwa penulis dalam skripsi ini memiliki beberapa kekurangan karena keterbatasan instrumen penelitian hanya pada studi pustaka. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran guna menunjang karya tulis ini menjadi lebih baik. Penulis juga menaruh harapan agar karya tulis ini dapat diteliti lebih lanjut sehingga memberikan wawasan baru bagi generasi selanjutnya.